

SIARAN PERS

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dan PDTT Manajemen Aset Semester II 2017

Pontianak (19/12/17) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 19 Desember 2017 telah menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Manajemen Aset, kepada tujuh (7) entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Dra. Ida Sundari, M.M**, bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lingkup pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan suatu program atau kegiatan. Pemeriksaan kinerja menitikberatkan pada penilaian aspek ekonomi dan efisiensi, atas penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah, serta pemenuhan sasaran secara efektif. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT ditentukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPK yang mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Nasional. Pada Semester II tahun 2017 ini terdapat empat (4) tema pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: Pendidikan, Administrasi Kependudukan, Perijinan, dan Kesehatan. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kali ini difokuskan pada Manajemen Aset.

Area dan tujuan Pemeriksaan Kinerja yang telah dilakukan pada tujuh entitas, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2015 s.d. 2017 (Semester I), pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun 2015, 2016 dan 2017 (Semester I), pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun 2015, 2016 dan 2017 (Semester I), pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Informasi lebih lanjut:

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak.

☎ (0561) 585349

🌐 pontianak.bpk.go.id, ✉ bpkpontianak@gmail.com

SIARAN PERS

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Instansi terkait Lainnya;
5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017, pada Pemerintah Kabupaten Landak serta Instansi Terkait Lainnya;
6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi, Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 (Triwulan III) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Sintang dan Instansi Terkait Lainnya.

Area dan tujuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang telah dilakukan pada dua entitas, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Semester I 2017, pada Pemerintah Kabupaten Sambas;
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2016 dan Semester I tahun 2017, pada Pemerintah Kabupaten Melawi.

Simpulan hasil pemeriksaan kinerja dan dengan tujuan tertentu dari kesembilan entitas tersebut, adalah pengelolaan program/kegiatan dinilai *kurang efektif*. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan berdasarkan simpulan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain: Perencanaan yang kurang memadai; Tidak adanya regulasi dan SOP pelaksanaan kegiatan; Penatausahaan dan penilaian aset belum memadai; Lemahnya pengendalian dan pengawasan internal; Kompetensi pegawai pelaksana yang kurang memadai; Tata kelola pengelolaan data dan informasi yang kurang memadai; Monitoring dan evaluasi yang kurang memadai; Kurang bayar; Belum memadainya analisis kebutuhan pegawai; dan Pemanfaatan aplikasi yang belum optimal. Sedangkan simpulan atas PDTT adalah *tidak sesuai*, karena masih ditemukannya Pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT ini selanjutnya menjadi tanggung jawab entitas untuk menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan. Dengan adanya rekomendasi hasil pemeriksaan ini diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan program/kegiatan menjadi lebih baik.

**Subbagian Humas & Tu Kepala Perwakilan
Bpk Perwakilan Provinsi Kalbar**

Informasi lebih lanjut:

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak.

☎ (0561) 585349

🌐 pontianak.bpk.go.id, ✉ bpkpontianak@gmail.com